

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999)<sup>1</sup>.

Menurut survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Mencengangkan, negara kita berada di bawah negara yang baru merdeka tahun 60-an tapi itulah kenyataannya. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang sangat rendah, yaitu hanya menduduki peringkat ke-37 dari 57 negara yang telah disurvei di dunia. Dan masih menurut hasil survei

---

<sup>1</sup> Human Data Index yang disurvei oleh UNESCO, Saiful Hadi, 2008, Pembelajaran Kooperatif dan Konstruktif Usia Dini Pada SMK, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

dari lembaga yang sama pula, Indonesia hanya berpredikat sebagai *follower* (pengikut) bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Ternyata tak hanya lembaga asing yang telah mennyurvei Indonesia dengan peringkat yang begitu buruk. Kualitas pendidikan yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan di dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP), tentu saja sekolah yang mendapat pengakuan dari dunia adalah sekolah yang telah bertaraf internasional. Dari 20.198 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program*. Apa penyebab utama kualitas pendidikan di Indonesia sebegitu rendahnya sampai-sampai dunia Internasional tidak mengakuinya.

Ada beberapa sebab,

Pertama, masalah mendasar yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan. Kedua, masalah-masalah yang terdapat pada cabang, yaitu berbagai problem yang berkaitan dengan dengan aspek teknis/praktis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti mahalny biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru, dan sebagainya. Memang tak semua sekolah dan tenaga pengajar seperti yang digambarkan pada kalimat di atas namun sebagian besar sekolah-sekolah di Indonesia masih memprihatinkan dan masih membutuhkan banyak tenaga pengajar.

Dan Ketiga, lulusan-lulusan SMA yang dicetak oleh bangsa ini belum siap untuk menghadapi dunia kerja karena ketiadaan soft skill dan keterampilan yang memadai. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar kurikulum SMA berupa teori dalam pendidikan formal. SMA pada hakikatnya hanya mencetak lulusan yang pendidikannya harus diteruskan ke Perguruan Tinggi atau ke sebuah pelatihan karena pembelajarannya masih berupa teori dan kurang mendukung kebutuhan dunia kerja. Padahal biaya untuk meneruskan sebuah generasi bangsa ke Perguruan Tinggi tidaklah murah dan masih cukup mahal untuk sebagian besar kalangan masyarakat Indonesia. Dengan semakin sempitnya lapangan kerja saat ini maka bisa dipastikan lulusan SMA akan semakin sulit untuk mencari kerja hanya dengan bermodal teori dan ini dapat mengurangi tingkat kesejahteraan sebuah keluarga sehingga jumlah masyarakat miskin semakin bertambah.

Hal ini juga diperparah oleh keadaan ekonomi di Indonesia yang sampai saat ini belum stabil sehingga membuat para anggota masyarakat menengah ke bawah berpikir dua kali sebelum menyekolahkan anaknya, padahal gerbang untuk menuju kesejahteraan adalah melalui akses pendidikan yang sarat dengan keterampilan dan pengetahuan. Jika hal ini tidak segera ditangani maka kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia akan semakin buruk. Dengan mengetahui hal itu, DepDikNas berupaya untuk mempromosikan SMK sebagai salah satu alternatif terbaik untuk pemecahan masalah ini.

SMK sebagai sekolah kejuruan dipandang cukup penting saat ini dalam mencetak generasi-generasi bermutu dan siap kerja terutama dengan biaya yang terjangkau karena tidak membutuhkan pendidikan tambahan di Perguruan Tinggi atau tempat pelatihan lainnya. Sebetulnya SMK sudah sejak lama telah mencetak para orang-orang yang handal dalam dunia kerja sekaligus juga identik dengan istilah sekolahnya anak nakal dan kurang mampu. Dikatakan seperti itu karena dalam masyarakat kita telah lama berkembang paradigma yang menyatakan bahwa SMK merupakan pilihan terakhir bagi anak kita jika tidak diterima di SMA pilihannya. Meskipun pesimisme masyarakat terhadap SMK masih selalu ada namun hal ini sudah mulai berkurang dengan semakin meningkatnya persaingan, menyempitnya lapangan kerja, dan banyaknya jumlah lulusan SMA yang menganggur membuat masyarakat melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa SMK saat ini mulai menjadi pilihan alternatif.

Dalam lingkup paradigmapun masih banyak orang tua yang terjebak dengan gengsi sesaat, sebagian dari masyarakat kita ada yang memasukan anaknya ke SMA favorit karena alasan ini. Hal ini bisa terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhi para orang tua seperti faktor lingkungan, teman, keluarga, dsb. Selain itu, bisa jadi para orang tua tersebut dulunya juga merupakan lulusan SMA, mereka sesungguhnya tidak mengetahui metode pembelajaran SMK itu seperti apa bahkan banyak masyarakat yang hanya mengetahui bahwa pelajaran di SMK hanya teori terus-menerus dan tidak ada pelajaran yang berupa teori seperti matematika, sains, agama, bahasa, dsb. Parahnya, paradigma itupun menurun pada anak yaitu setelah

SMP lanjutkan ke SMA. Hal itu pula didukung oleh para guru SMP yang lebih menginginkan anak didiknya masuk SMA favorit.

Hal itu tak lain adalah sebagai penciptaan citra semata bagi SMP yang ditinggalkannya. SMP mana yang tidak bangga jika anak didiknya berhasil masuk SMA favorit dengan nilai yang memuaskan dan sudah pasti nama-nama anak yang dulunya bersekolah di SMP tersebut dan telah berhasil masuk di SMA favorit akan dipajang di SMP mereka guna meningkatkan antusiasme calon murid dan calon wali murid untuk bersekolah di SMP tersebut. Selain itu, banyak juga SMK yang telah secara resmi mendapat sertifikat ISO atau standar internasional. Itu sama halnya dengan memperbaiki kualitas pendidikan di SMK agar setara dengan negara-negara lainnya, tak hanya itu dengan standar yang dimiliki oleh SMK tersebut maka para pelaku dunia usaha akan mencari tenaga-tenaga kerja dari sekolah SMK tersebut. Akan tetapi hal yang berbeda justru menimpa SMA yang bersertifikat ISO, SMA yang mendapat standard Internasional biasanya tidak banyak berubah dan anak didik hanya mendapat tambahan fasilitas didalamnya bukan keterampilan seperti yang diajarkan pada SMK juga tak adanya jumlah pelaku dunia usaha yang bertambah ataupun tertarik untuk memperkerjakan mereka selepas mereka selesai menempuh studinya.

Kenyataan yang berbeda ada pada negara-negara tetangga kita yang telah memfokuskan diri terhadap pengembangan pendidikan di negaranya lewat SMK. Di Tiongkok, pendidikan kejuruan bukan hal yang baru bagi mereka. Sejak memasuki era reformasi dan membuka diri terhadap dunia luar (1978) sekolah kejuruan

mendapat suntikan dana yang cukup besar dari pemerintah. Pada tahun 2001, terdapat 17.770 sekolah kejuruan. Proporsi siswa kejuruan meningkat pesat dari 19% pada tahun 1980, mencapai hampir separuh dari sekolah yang ada yakni 45,3% pada tahun 2001. Para tenaga pendidik juga mendapat perhatian besar dari pemerintah. Kelas-kelas khusus dibuka untuk meningkatkan kualitas pengajar. Ada sekitar 200 tempat pelatihan yang didirikan oleh departemen sentral dan pemerintah.

Seiring dengan era reformasi, pemerintah Tiongkok juga secara aktif mulai menjalin kerjasama internasional di bidang pendidikan kejuruan. Dalam rentang waktu 20 tahun terakhir, pemerintah Tiongkok telah mengirim banyak delegasi ke lebih dari 20 negara yang memiliki pendidikan kejuruan yang dianggap maju. Mereka juga mengundang para ahli dari negara luar untuk memberikan seminar sekaligus bekerja sama dengan institusi pendidikan kejuruan asing untuk mendorong perkembangan pendidikan kejuruan di dalam negeri.

Di Jerman, sejarah pendidikan kejuruan telah dimulai sejak abad ke 19. Sekolah jenis ini menekankan taktik pendidikan ganda dimana selain *training*(praktek) kejuruan di sekolah, para anak didik juga diberi kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan serta institusi tertentu. Pada tahun 2001, sebanyak dua pertiga dari seluruh generasi muda berusia dibawah 22 tahun telah menjalani magang di perusahaan. Untuk mendukung perkembangan pendidikan ini, pada tahun 2004, pemerintah Jerman mengeluarkan peraturan yang menegaskan bahwa semua pemilik perusahaan, kecuali yang berskala kecil, wajib menerima siswa magang

untuk bekerja di perusahaannya<sup>2</sup>. Sedangkan di tanah air kita, jumlah para peminat lulusan SMP yang ingin masuk SMK juga melonjak. Setidaknya hal ini bisa terlihat pada tabel 1.1 di bawah ini,

**Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Angka Partisipasi Kasar					
		Tahun 2005/2006		Tahun 2006/2007		Tahun 2007/2008	
		Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri
1.	Danurejan	184	156	231	254	514	347
2.	Gedongtengen	236	216	225	225	364	229
3.	Godokusuman	716	679	821	726	1830	971
4.	Gondomanan	-	-	-	-	-	-
5.	Jetis	2564	2439	2867	2540	5163	4349
6.	Kotagede	-	-	-	-	-	-
7.	Kraton	79	62	83	67	120	67
8.	Mantrijeron	231	197	269	183	270	250
9.	Mergangsan	491	328	587	423	671	455
10.	Ngampilan	-	-	-	-	-	-
11.	Pakualaman	36	97	38	122	51	149
12.	Tegalrejo	55	84	51	93	56	172
13.	Umbulharjo	2684	2691	2814	2631	3124	3016
14.	Wirobrajan	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.982</b>	<b>6.949</b>	<b>8.025</b>	<b>7.264</b>	<b>12.163</b>	<b>10.005</b>

Sumber: Laporan Rekapitulasi Data Pendidikan Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun.

<sup>2</sup> Data dari Germany Vocational Education Center, Saiful Hadi, 2008, Pembelajaran Kooperatif dan Konstruktif Usia Dini Pada SMK, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sampai sekarang ada jumlah SMK di kota Yogyakarta mencapai 30 unit, 7 unit SMK negeri dan 23 SMK swasta. Jumlah kelas sebanyak 796 unit, 253 di negeri dan 204 di swasta. Total guru adalah 1.520 orang, 796 orang di SMK negeri dan 724 orang di swasta. Adapun jumlah murid adalah 22.064 orang, 10.005 siswa di SMK negeri dan 12.163 siswa di SMK swasta<sup>3</sup>.

Di satu sisi ini menunjukan keberhasilan promosi yang dilakukan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), khususnya melalui Dirjen DikDasMen. Di sisi lain, fenomena itu menunjukkan adanya kecenderungan pragmatis masyarakat memilih SMK. Ini tidak lepas dari peran SMK yang mampu mencetak tenaga terampil dan mengurangi masalah pelik pengangguran dan kemiskinan. Menurut Joko Sutrisno (2008) lulusan SMK mampu menyiapkan peserta didik yang kreatif dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta memiliki iklim kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja. Sehingga ada beberapa syarat agar SMK betul-betul dapat mencetak tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di dunia kerja, yaitu :

Pertama, SMK harus mempunyai fasilitas bengkel atau laboratorium kerja yang lengkap atau modern, serta membangun kerjasama yang kuat dengan dunia kerja misalnya dengan perusahaan atau industri sasaran dari lulusan-lulusan SMK tersebut. Kedua, dari aspek tenaga pengajar banyak guru SMK yang ketinggalan dalam meng-update keahlian agar sesuai dengan perkembangan zaman. Akibatnya,

---

<sup>3</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 bagian Pendidikan

banyak pendidikan SMK di Nusantara yang dijalankan secara asal-asalan yang muaranya hanya menghasilkan lulusan tanpa kompetensi memadai. Ketiga, program-program yang ditawarkan SMK saat ini belum efektif dan efisien. Ini dapat dilihat dari kualitas lulusan yang belum mampu menjawab tantangan dunia industri dan pendidikan. Dengan kata lain, belum ada kesesuaian antara SMK, dunia pendidikan, dan industri. Ketika lulusan SMK masuk dunia kerja, ternyata teknologi industri sudah berkembang pesat melebihi teknologi yang mereka pelajari saat masih duduk di bangku SMK.

Seperti yang dialami siswa-siswa di SMK Jurusan Nautika Perikanan Laut (NPL), Kabupaten Malang. Sebenarnya, proses belajar mengajar (PBM) di SMK itu sesuai dengan jurusannya, yaitu NPL. Dimulai dari tingkat II, para siswa sudah berbulan-bulan lamanya mengikuti praktik kerja lapangan (PKL) di laut. Konsekuensinya, proses belajar mengajar dengan mata pelajaran yang di-UN-kan (UN = Ujian Negara) tidak banyak dipelajari, bahkan hampir tidak punya kesempatan dibandingkan dengan SMA biasa. Akibatnya, siswa-siswa berbakat dan sudah mengantongi beberapa sertifikasi kecakapan melaut, bahkan sudah diterima magang di Jepang, terpaksa tidak lulus UN. Ironisnya, hanya karena UN, mereka sempat kesulitan untuk mengejar cita-cita di negara yang lebih maju dari Indonesia.<sup>4</sup>

Tampaknya tidak ada pilihan bagi SMK, selain berbenah diri. Menurut Srikati Prawirowerdjojo (2007), langkah utama adalah mengubah orientasi dan

---

<sup>4</sup> Hadi, Saiful. 2008. Pembelajaran Kooperative dan Konstruktive Usia Dini Pada SMK. Jakarta: PT. Bumi Aksara

paradigma pendidikan. Jika selama ini tujuan pendidikan di SMK hanya mengejar ijazah, kini harus diganti mengejar kompetensi. Konsekuensinya, sekolah harus paham standar dunia kerja, dan harus membangun kerja sama yang baik dengan banyak pihak, terutama dunia industri dalam arti luas. Selain itu, sekolah membutuhkan sistem pembelajaran yang tidak berjarak dengan dunia kerja dan masyarakat yang selalu berkembang dinamis.

Tiap SMK baik itu negeri maupun swasta mempunyai keunggulan tersendiri. Misalnya di SMK negeri biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh tiap orang tua pada umumnya lebih terjangkau dari biaya pendidikan di SMK swasta. Selain itu pemerintah juga lebih fokus menangani SMK negeri daripada SMK swasta, hal ini dikarenakan SMK negeri adalah kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan. Dalam SMK ini berlaku peraturan pemerintah yang artinya setiap perangkat sekolah, karyawan, serta tenaga pendidik harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya terdapat peraturan sekolah yang baru yaitu dilarang memungut biaya tambahan bagi sekolah negeri yang anak didiknya hendak melaksanakan UNAS, maka seluruh SMK negeri di Yogya akan melarang para karyawan dan tenaga pengajarnya untuk tidak meminta sumbangan atau pungutan liar yang sifatnya pribadi<sup>5</sup>.

Perbedaan ini juga membedakan status karyawan dan tenaga pendidik yang bekerja di SMK swasta maupun negeri. Di SMK negeri biasanya status dari tenaga pengajarnya adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun jika bekerja di SMK swasta

---

<sup>5</sup> Sistematika Prosedural Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2008

maka statusnya adalah karyawan biasa/tidak tetap yang bisa dipecat sewaktu-waktu dan jika dipecat hanya mendapatkan pesangon bukan tunjangan periodik seperti halnya PNS karena mereka pada umumnya dipekerjakan dengan sistem kontrak.

Sedangkan pada SMK swasta, sistem pembelajarannya dapat diatur dengan bebas begitu juga dengan peraturan-peraturan lainnya. Sistem pembelajaran yang ada pada sekolah ini pada umumnya tidak mengikuti pedoman-pedoman yang diberikan pada SMK negeri namun lebih mengarah pada kurikulum yang telah diterapkan di sekolah-sekolah kejuruan di luar negeri. Peraturan lain yang dimaksud ada berbagai ragamnya, salah satunya adalah perbedaan seragam yang dipakai oleh anak-anak didiknya. Jika siswa tersebut bersekolah di SMK Negeri maka pada bet seragamnya tertera kalimat *Pelajar Kota Yogyakarta*, sebaliknya pada siswa yang bersekolah di SMK swasta maka ia harus mematuhi peraturan berpakaian yang berlaku di sekolahnya bahkan pada salah satu SMK swasta di Yogya membolehkan siswanya untuk tidak mencukur rambut.

SMK swasta adalah salah satu sekolah kejuruan yang lebih *up to date* dengan tren pendidikan yang sedang berkembang akhir-akhir ini daripada sekolah-sekolah pada umumnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar para anak didik yang bersekolah disini berasal dari kalangan keluarga menengah ke atas sehingga bisa pula dikatakan bahwa penyamaan atau pengadopsian sistem pembelajaran atau kurikulum dari luar negeri tak hanya sebuah tuntutan namun juga karena faktor prestise. Inilah salah satu kelebihan SMK swasta dalam soal pembiayaan, sekolah ini rata-rata memang sedikit lebih mahal daripada sekolah negeri namun lulusan-lulusan dari sekolah swasta

biasanya akan dapat bersaing dengan lulusan-lulusan dari SMK negeri karena standar kualitas internasional yang diterapkan lebih tinggi dari standar nasional di dalam negeri.

Sementara itu, secara lebih konkrit Dinas Pendidikan kota Yogya mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada peningkatan kualitas SMK-SMK di Yogya baik itu SMK swasta maupun SMK negeri. Kebijakan peningkatan kualitas lembaga pendidikan seperti itu mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia dan juga Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan diri dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain dengan menerapkan manajemen ISO 9001 - 2000 bagi peningkatan kualitas SMK-SMK di Yogya, menurut Kepmendikbud No. 0531012001 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah harus memiliki persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan serba lengkap dan cukup seperti, luas lahan, perabot lengkap, peralatan/laboratorium/media, infrastruktur, sarana olahraga, dan buku dengan rasio 1:2. Kehadiran Kepmendiknas itu dirasakan sangat tepat karena dengan keputusan ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan

sesuai dengan persyaratan minimal yang diterapkan sehingga kualitas pendidikan tidak menjadi semakin terpuruk.

Ada pula Kepmendiknas No. 044/U/2002 dan UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 56 ayat (1) yang isinya mengenai peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Pada ayat (2) Dewan pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis, dan pada ayat (3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri selaku badan yang melakukan perencanaan nasional sudah menuangkan program-program Depdiknas ke dalam beberapa program, antara lain Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap kab/kota dan Pembangunan sekolah bertaraf internasional di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota. Hal ini berarti kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan harus bersaing dengan kota-kota lain dalam hal peningkatan kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah negeri, dan untuk bisa bersaing dengan kota-kota lain maka Dinas Pendidikan setempat harus melaksanakan *best practices* pelayanan pendidikan dengan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga

masyarakat; meningkatkan kualitas pendidikan anak didik; meningkatkan kualitas guru; meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan; dan mempertahankan dan meningkatkan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah Alokasi Anggaran Pendidikan mulai tahun 2003 alokasi anggaran pendidikan ditingkatkan, pada tahun 2006 telah dialokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 % dari APBD di luar gaji guru. Perhitungan anggaran pendidikan adalah dengan membandingkan anggaran pendidikan di luar gaji pada Dinas Pendidikan dengan keseluruhan belanja APBD di luar gaji. Proporsi anggaran pendidikan pada Tahun Anggaran 2004 sejumlah 12,53 %, Tahun Anggaran 2005 sejumlah 16,96 %, Tahun Anggaran 2006 sejumlah 22,10 %, dan Tahun Anggaran 2007 sejumlah 22,26 %. Dinas Pendidikan juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang khusus menangani Jaminan Pendidikan Daerah. Dengan adanya UPTD, maka pelayanan jaminan pendidikan daerah lebih fokus dan dapat mempercepat/mempermudah pelayanan.

Hal ini menjadi sebuah tema yang penting untuk diteliti dan diangkat karena menjadi sorotan masyarakat luas apalagi perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara di Asia sudah diambang mata sementara persaingan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan sudah teramat ketat. Karena itulah, mau tak mau kualitas SDM yang dimiliki oleh kota ini harus dibenahi, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat luas kini menyoroti kebijakan Dinas Pendidikan yang memperketat kualitas pendidikan

karena selain alasan persaingan global, kini semakin banyak perusahaan atau industri yang mencari *fresh graduate* SMK untuk dipekerjakan.

Hal ini telah berlangsung sejak lama, salah satunya seperti yang terjadi di Jakarta, Kamis 28 Agustus 2008. Sebanyak 3.000 lowongan pekerjaan tersedia untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada The 2nd Indonesia Job Matching Expo 2008 yang berlangsung di Plaza Depdiknas.<sup>6</sup> Sedikitnya 47 perusahaan dari berbagai sektor industri menawarkan lowongan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah.

#### **B. Rumusan Masalah :**

1. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kualitas pendidikan pada SMK negeri dan swasta?
2. Bagaimanakah kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK negeri dan swasta?

#### **C. Tujuan Penelitian :**

1. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK swasta dengan SMK negeri setempat agar dapat bersaing didunia kerja.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Dinas Pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan pada SMK negeri dan swasta.

---

<sup>6</sup> Sumber dari Koran Merapi, 24 November 2008.

#### **D. Manfaat hasil penelitian :**

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja dan strategi Dinas Pendidikan Yogyakarta mengenai peningkatan kualitas pendidikan pada SMK Swasta dan Negeri.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat membantu memberikan sumbangsih atau masukan bagi Dinas Pendidikan, SMK-SMK di Yogyakarta, serta masyarakat Yogyakarta.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja dari Dinas Pendidikan di Yogyakarta dalam memberikan pelayanan pendidikan yang tepat bagi anggota masyarakatnya.
4. Bagi penulis merupakan tambahan pengetahuan secara nyata.

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka Dasar Teori merupakan uraian untuk menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antara variabel berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Sehingga akan tampak jelas, sistematis, dan ilmiah dalam melakukan kegiatan penelitian sebagai unsur terpenting adalah teori, karena mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencoba menjelaskan permasalahan atau fenomena yang ada.

Menurut Effendi dan Singarimbun (1989)<sup>7</sup> :

*“Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti.”*

Pendapat di atas semakin menguatkan bahwa teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis yang ada di antara fenomena sosial maupun alami yang akan diteliti. Berdasarkan konsep di atas dapat dikatakan bahwa kerangka dasar teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kerangka dasar teori di dalam skripsi ini terdiri dari dua, yaitu Analisis Kebijakan dan Pendidikan. Di bawah ini akan dijabarkan lebih lanjut :

### **1. Analisis Kebijakan**

Analisis Kebijakan adalah suatu penelitian komprehensif pada implementasi/pelaksanaan program suatu instansi atau dinas yang terkait yang bertujuan untuk mengetahui manfaat, kelebihan, serta kekurangan yang terkandung dalam program yang dicanangkan. Dengan demikian, analisis kebijakan juga merupakan salah satu langkah awal dari evaluasi sebuah program yang telah berjalan selama beberapa waktu. Analisis Kebijakan ini terdiri dari tiga hal yaitu faktor penyebab implementasi, implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan. Berikut ini dijelaskan dua hal tersebut secara lebih lanjut.

---

<sup>7</sup> Sofian Effendi dan Singarimbun, 1989; Unsur-Unsur Kebudayaan dan Pendidikan. Jakarta: LP3ES.

### 1.a Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor adalah suatu penyebab terjadinya tindakan, dalam hal ini faktor yang terkait adalah tingginya tingkat pengangguran di kota Yogya yang didominasi oleh lulusan-lulusan non-SMK. Dengan demikian lulusan-lulusan tersebut tidak mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dunia kerja. Hal ini secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi permasalahan-permasalahan sosial lainnya, seperti bertambahnya kemiskinan, bertambahnya tingkat kriminalisasi, dan sebagainya. Mengetahui hal itu Dinas Pendidikan Nasional melalui Dinas Pendidikan Kota Yogya berusaha untuk meningkatkan kualitas SMK-SMK di Yogya dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuannya tak lain agar dapat menekan angka pengangguran (*unemployment*) sebanyak mungkin dan mengurangi permasalahan-permasalahan sosial yang mungkin terjadi karena bertambahnya pengangguran.

### 1.b Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah penerapan program-program, kegiatan, jadwal yang telah disusun dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengatasi sebuah permasalahan tertentu. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang

mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan dan hasilnya hanya bisa diprediksi bukan dihitung secara spesifik. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Menurut Jusuf, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. (Jusuf M Hanafiah dkk, 1994:101).<sup>8</sup> Dalam hal ini, implementasi kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan oleh Dinas Pendidikan Yogya. Salah satunya dengan peningkatan kualifikasi tenaga pengajar yaitu setiap guru baik dari jenjang TK sampai SMK/SMA harus berijazah serendah-rendahnya Diploma 4 (D4). Guru-guru yang telah memenuhi persyaratan itu akan digaji dua kali lipat daripada guru yang belum memenuhi persyaratan itu, selain itu hal ini juga sudah tertera dengan jelas pada PP No 19 Tahun 2005 pasal 28, 29 dan 30.

---

<sup>8</sup> Hanafiah, M Jusuf. 1994. Manajemen Mutu Terpadu. Ghalia Indonesia, Jakarta.

## 2. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses penambahan wawasan dan pengetahuan sejak dini hingga akhir hayat. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan diantaranya adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai macam aspek yang penjelasannya berada di bawah ini:

### 2.1 Kualitas Pelayanan

Kualitas secara umum dapat dijelaskan sebagai karakteristik dari suatu produk atau jasa yang ditentukan oleh pemakai atau customer dan diperoleh melalui pengukuran proses serta melalui perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*). Beberapa definisi tentang kualitas yang dikemukakan para ahli antara lain:

3.1 Eugene (1986) menyatakan: *“The difficulty in defining quality is to translate future needs of the user into measurable characteristics, so that a product can be designed and turned out to give satisfaction at a price that will user pay.”*<sup>9</sup> Yang artinya adalah kesulitan dalam pendefinisian kualitas adalah mentranslate atau mengubah kebutuhan yang akan datang dari *user* atau pengguna kedalam suatu karakteristik yang dapat diperlakukan, supaya sebuah produk dapat didisain dan diubah untuk memberikan kepuasan dengan harga yang akan dibayar oleh user atau pemakai.

---

<sup>9</sup> Eugene, James. 1986. “What Costumer Wants”, Planning Review (Mei/Juni 1986), hal 33-35.

3.2 Victor (1979) menyatakan: “*Quality is conformance to requirements or specification.* Yang artinya adalah kualitas adalah kesesuaian dari permintaan atau spesifikasi.”<sup>10</sup>

3.3 Kristan (1974) menyatakan: “*Quality is fitness for use.* Yang artinya adalah kualitas adalah kelayakan atau kecocokan penggunaan.”<sup>11</sup>

3.4 Clarence menyatakan: “*The quality of a product or service is the fitness of that product or service for meeting its intended use as required by the customer.*” Yang artinya adalah kualitas dari suatu produk atau jasa adalah kelayakan atau kecocokan dari produk atau jasa tersebut untuk memenuhi kegunaannya sehingga sesuai dengan yang diinginkan oleh customer<sup>12</sup>.

Dalam hal ini kualitas pelayanan yang dimaksud dalam SMK swasta adalah kualitas yang menjadi prioritas dari SMK tersebut, SMK swasta pada umumnya lebih unggul daripada SMK negeri karena mereka berani melengkapi sekolahnya dengan sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Mereka dapat melakukan hal itu karena biasanya pemasukan atau dana kas yang dimiliki cukup besar sehingga memungkinkan SMK-SMK swasta mempunyai fasilitas yang lebih lengkap daripada fasilitas yang dimiliki oleh SMK negeri. SMK swasta juga lebih memperhatikan isu-isu terbaru yang

---

<sup>10</sup> Vasques, Victor. 1979. “*Nation’s Business and The Strategies*”, Enclyopedi Point Camden, Inc New Jersey. Hal; 129-131.

<sup>11</sup> Steall, Kristan. 1974. “*Education System and Process*”, Oxford, Ohio: The Education Forum

<sup>12</sup> Callahan, Clarence. 1974. “*Measurement Mechanism of Capital State*”, Driscoll and Smith Fergusson Associates, Rockport.

berkembang di tengah dunia pendidikan sehingga mereka selalu bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan dan permintaan dari siswa-siswa SMK sebagai *costumer* yang utama.

Sementara itu, Karl Smit (1992:17) telah menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah sesuatu yang cukup kompleks dan saling berhubungan dengan hal lain.<sup>13</sup> Hal ini berarti untuk menentukan tingkat pelayanan yang baik harus ditinjau dari 5 aspek, yaitu:

a. **Aspek Quality**, adalah kualitas pendidikan yang terdapat pada SMK baik negeri maupun swasta. Indikator yang diukur adalah: 1).Standar yang diterapkan, standar lokal, nasional, ataukah standar Internasional. Standar dalam sebuah sekolah kejuruan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam melihat kualitas yang dimiliki. 2).Pengakuan dari lembaga lain, yaitu pemberian penghargaan atas prestasi yang telah ditempuh oleh SMK tersebut. Misalnya seperti rekomendasi dari pihak industri atau perusahaan yang telah mengevaluasi kualitas dan mutu dari lulusan-lulusan SMK tersebut.

b. **Aspek Calculation**, adalah salah satu faktor/aspek yang berhubungan dengan dana penunjang operasional sekolah kejuruan. Sebuah sekolah kejuruan memang membutuhkan dana yang lebih besar daripada jumlah

---

<sup>13</sup> Smit, Karl. 1992. "How Much to Spend on Education; Small Steps for Bigger Future", The Hillcrest Institute. Hal 31-37

dana yang dibutuhkan oleh SMA karena pada sekolah kejuruan, dana tersebut dapat digunakan untuk perawatan ataupun peremajaan alat-alat praktek yang sering digunakan oleh murid-murid SMK. Besarnya dana pada setiap sekolah kejuruan di Yogyakarta tidak sama di setiap sekolah karena pada tiap sekolah mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ada sekolah kejuruan yang membutuhkan dana yang cukup besar karena pada sekolah itu mempunyai kelas jurusan teknologi industri yang bagus, otomatis untuk mempertahankan citra positif itu sekolah terpaksa menganggarkan dana operasional lebih besar karena jurusan tersebut memang lebih banyak membutuhkan alat-alat praktek yang memadai dibanding jurusan lain. Tak hanya itu, berbagai faktor sebetulnya dapat mempengaruhi besarnya biaya yang dicanangkan, faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar lingkungan sekolah sehingga pada setiap sekolah kejuruan memang mempunyai besaran biaya yang tidak sama. Meskipun demikian, rata-rata sekolah kejuruan memang menghabiskan biaya yang lebih besar daripada sekolah-sekolah menengah umum lainnya.

c. **Aspek Communication**, adalah faktor yang turut berhubungan dengan pemahaman masyarakat mengenai seluk beluk sekolah menengah kejuruan, saat ini masyarakat Yogyakarta telah berangsur-angsur untuk memilih sekolah kejuruan sebagai sekolah alternatif setelah SMA namun hal ini tak lepas dari usaha dan kerja keras Dinas Pendidikan Yogya yang

selalu berusaha membuat program yang dapat mendekatkan citra positif SMK kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Yogya adalah membuat program pencitraan SMK yang berfungsi untuk membuka pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pembekalan ketrampilan pada usia dini, dengan demikian lulusan-lulusan SMK diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat mengurangi angka pengangguran terdidik secara signifikan di kota ini. Tingkat kesadaran masyarakat yang cukup rendah untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kejuruan membuat Dinas Pendidikan dan pihak-pihak yang terkait turun tangan dengan cara mengkampanyekan dan mempromosikan SMK sebagai sekolah yang lebih baik dari sekolah lainnya yang sederajat karena lulusannya diproyeksikan agar dapat mandiri dan mempunyai mental sebagai seorang pengusaha sehingga tidak tergantung pada orang lain ataupun menunggu pada dunia kerja yang membutuhkan tenaganya. Salah satu caranya adalah menciptakan program pencitraan SMK yang berfungsi untuk mengubah image masyarakat bahwa sekolah kejuruan tak selalu menjadi *second opinion* bagi wali murid. Citra sekolah menengah kejuruan yang terlanjur negatif di mata masyarakat memang sulit dihilangkan, apalagi bagi sebagian besar masyarakat kita telah menjadi budaya bahwa dengan masuk di SMA favorit maka hal itu dapat menjadi kebanggaan tersendiri di kalangan mereka. Seiring dengan semakin sulitnya persaingan dan sempitnya

lapangan pekerjaan, agaknya paradigma ini mulai bergeser dan masyarakat mulai melirik SMK sebagai salah satu sekolah pilihan bagi anaknya.

d. **Aspek Support**, yaitu berkaitan dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak untuk membangun sekolah menengah kejuruan, dukungan tersebut dapat berupa dana, tenaga, maupun pikiran/ide yang bias membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah-sekolah kejuruan pada umumnya. Banyak sedikitnya dukungan yang diperoleh sekolah dapat dikatakan jika sekolah kejuruan yang bagus adalah sekolah yang mempunyai dukungan dan bantuan yang kuat dan dapat diandalkan dari pihak-pihak terkait. Mulai dari para orang tua, murid, tenaga pengajar/guru, sampai komite sekolah. Dukungan-dukkungan yang kuat seperti ini hanya bias diperoleh apabila para *stakeholders* yang terkait memiliki kesadaran yang kuat akan pentingnya kerjasama untuk membangun sekolah menjadi lebih baik lagi. Memang, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar sekolah dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan karena itu tak hanya kerja keras dan ketekunan yang harus dimiliki oleh para *stakeholders* namun juga kesabaran. Selain itu, komitmen yang kuat juga harus dimiliki oleh para *stakeholders* dalam membangun sekolah kejuruan karena dalam menuju arah yang lebih baik pada sebuah sekolah dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mewujudkannya.

## **F. Definisi Konsepsional**

1. Analisis Kebijakan adalah: usaha untuk mengembangkan kemampuan dan memperbanyak pengetahuan baik dilakukan di luar sekolah maupun di dalam sekolah dan hal tersebut berlangsung seumur hidup.
2. Pendidikan adalah: kelayakan atau kecocokan dari produk atau jasa yang diberikan untuk memenuhi kegunaannya sehingga sesuai dengan yang diinginkan oleh customer.

## **G. Definisi Operasional :**

Menurut Anthony Tejas (1986:23), definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable atau dengan kata lain sebagai petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variable untuk mempermudah variable penelitian. Maka dari pendapat tersebut dapat disimpulkan variabel penelitian ini meliputi :

1. Variabel aspek pendukung dan penghambat peningkatan kualitas pendidikan SMK adalah faktor-faktor yang mendukung atau yang menghambat implementasi kebijakan ini. Indikator ini terbagi dalam beberapa aspek yaitu: Pendanaan, partisipasi *stakeholders*, kesadaran masyarakat dan kualifikasi tenaga pengajar.
2. Variabel aspek peningkatan kualitas pendidikan SMK adalah peningkatan terhadap input untuk menghasilkan output dalam pengelolaan dan pengembangan

pendidikan dalam rangka melayani masyarakat. Indikator ini terbagi dalam beberapa aspek. Yaitu:

2.1 *Aspek Quality*, terdiri dari:

- 2.1.1 Standar lokal(mandiri), standar nasional(RSBI), atau SBI (standar internasional).
- 2.1.2 Kesesuaian latar belakang pendidik dengan pelajaran yang diampu.
- 2.1.3 Jenjang minimal strata pendidikan para tenaga pendidik.
- 2.1.4 Kelengkapan sarana dan prasarana.

2.2 *Aspek Calculation*, terdiri dari:

- 2.2.1 Dana/Anggaran yang memadai untuk operasional sekolah.

2.3 *Aspek Communication*, terdiri dari:

- 2.3.1 Pencitraan SMK kepada para anggota masyarakat

2.4 *Aspek Support*, terdiri dari:

- 2.4.1 Tingkat kesadaran masyarakat terhadap SMK.
- 2.4.2 Komitmen dari para *stakeholders*.

2.5 Aspek Cooperative, terdiri dari :

2.5.1 Partisipasi dari berbagai pihak dalam pembangunan sekolah.

## **H. Metode Penelitian :**

Dalam sebuah penelitian, metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntunan pola pikir yang sistematis agar dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

Sutrisno Hadi, (2001) berpendapat bahwa :

*“Metodologi adalah ilmu mengenai berbagai cara untuk memahami suatu atau beberapa objek dari disiplin ilmu yang bersangkutan tersebut.”*

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian survey. Penelitian survey adalah pengumpulan informasi secara sistematis dari para responden dengan maksud untuk memahami atau memprediksikan beberapa aspek perilaku dari populasi Yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, komponen-komponen survey harus diperhatikan pada sampling, design questioner, atau interview, pengadministrasian questioner, dan analisis data.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian terletak di Dinas Pendidikan Yogyakarta. Persoalan utama yang akan diteliti adalah perbandingan kualitas pada pendidikan yang diselenggarakan antara SMK swasta dengan SMK negeri terhadap tuntutan di dunia kerja khususnya kota Yogyakarta.

## **3. Unit Analisis**

Unit Analisis adalah objek yang digunakan dalam meneliti sebuah permasalahan/fenomena yang terjadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam hal ini unit analisis yang terkait adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terutama staff yang bekerja/menangani bagian SMK.

## **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data adalah suatu standard dan cukup sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Sehingga untuk memperoleh data yang cukup representative baik data sekunder maupun primer, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yang pada umumnya digunakan dalam penelitian ilmiah yang meliputi teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara.

### **a. Observasi**

Suatu data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Tuckman, teknik observasi dapat berarti mencatat segala sesuatu yang bisa diamati pada obyek

penelitian, namun penulis juga harus mencatat sebanyak mungkin keterangan yang dapat ia kumpulkan agar nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut. Dalam melakukan observasi, menurut Tuckman juga tidak boleh mengganggu obyek yang ditelitinya tersebut, penulis harus mampu untuk menjaga jarak yang cukup agar dapat memperoleh data penelitian yang valid.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Otlet dalam suatu ceramahnya pada International Economic Conference pada tahun 1985. Istilah dokumentasi juga muncul dalam karyanya Paul Otlet, *Traite de Documentation* pada tahun 1934. Menurutnya, dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi. Dan dokumen adalah segala sesuatu yang tertulis, tercetak, ataupun terekam, misalnya seperti surat, cek, saham, film, micro film, dan sebagainya.

Dalam hal ini, dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan, dokumen, foto-foto, dan kumpulan arsip yang ada kaitannya dengan obyek yang sedang diteliti. Dengan penggunaan tehnik dokumentasi, maka sebuah fenomena yang berhubungan dengan obyek penelitian akan dapat diamati secara lebih jelas. Menurut Sartono, dokumen adalah sebagai bahan referensi klasik untuk meneliti perkembangan histories khusus, pada umumnya digunakan untuk menjawab persoalan tentang siapa, kapan, dimana, apa, serta mengapa. Pada bahan referensi/arsip itu biasanya

kalimat ditulis secara deskriptif yang khas dan memuat fakta-fakta tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

c. Wawancara/Interview

Interview atau sering disebut juga wawancara mempunyai definisi suatu proses komunikasi interaksional antara dua pihak. Cara pertukaran yang digunakan adalah cara verbal dan nonverbal dan mempunyai tujuan tertentu yang spesifik. Ada dua macam tipe tujuan interview. Pada konseling untuk mengetahui lebih terkait pada adanya permasalahan dan mencari penyelesaiannya. Sedangkan pada kualitatif untuk memperoleh data penelitian. Tujuan daripada melakukan wawancara biasanya untuk untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah, Pengukuran psikologis: data yang diperoleh dari wawancara akan diinterpretasikan dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang subjek dalam rangka melakukan diagnosis permasalahan subjek dan usaha mengatasi masalah tersebut, Pengumpulan data penelitian: informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman mengenai suatu fenomena. Data dikumpulkan dengan cara wawancara karena kuesioner tidak dapat diterapkan pada subjek subjek tertentu, atau ada kekhawatiran responden tidak mengisi kuesioner ataupun tidak mengembalikan kuesioner pada penulis. Wawancara menjadi bagian dari penelitian survey ketika alat alat ukur lain seperti kuesioner dianggap tidak mampu mengungkap secara lebih mendalam

informasi dari responden. Informasi bersifat kualitatif, sangat individual serta variatif sehingga jawaban perlu dieksplorasi melalui suatu wawancara.

## **5. Data dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui interview/wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut antara lain, adalah pihak dari perangkat pemerintah dalam hal ini Kepala Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta beserta jajarannya yang terkait dalam penelitian ini.

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber dokumen/arsip, buku-buku, catatan-catatan, dan laporan dari media masa, serta berbagai jenis review yang masih berhubungan dengan obyek penelitian yang dihadapi.

## **6. Tehnik Analisis Data**

Saat menganalisis data, penulis menggunakan 1(satu) metode analisis kuantitatif.

### **a. Kualitatif**

Menurut Strauss dan Corbin (1997: 11-13), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas, adat-budaya, dan lain-lain. Salah satu keunggulan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para penulis dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan spesifik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan yang ada dari perspektif

partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan penelitian terhadap kenyataan yang menjadi obyek penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan (Hadjar, 1996 dalam Basrowi dan Sukidin, 2002:2). Pendekatan yang diperoleh dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada esensi dari fenomena yang diteliti.